

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan 2013-2017

Pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara yang direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Kota Padang Panjang, maka dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Analisis kinerja keuangan meliputi analisis kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, kinerja pembiayaan daerah, serta neraca daerah.

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan capaian kinerja riil yang dihasilkan, seberapa efektif capaian kinerja anggaran dan realisasi pendapatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan perbandingan realisasi dan anggaran. Penilaian kinerja juga bisa dilakukan berdasarkan kontribusi atau proporsi elemen pendapatan dan belanja terhadap totalnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2013-2017 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien serta

mengalokasikan dana pada pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBD, selain Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah. Penyerahan otonomi tersebut memberi peluang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kemampuan daerah dalam menggali PAD-nya dapat mengindikasikan kinerja daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

2) Dana Perimbangan

Sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola dalam APBD. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah melalui penerapan formulasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan keseluruhan pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri, sedangkan dana darurat merupakan bantuan pemerintahan dari APBN kepada pemerintah

daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

a. Target Pendapatan

Pendapatan Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 masih mengharapkan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat, sekalipun usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah diupayakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahun PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari Dana Perimbangan dan sumber Pendapatan Daerah Lainnya. Jika pada tahun 2013 jumlah PAD berjumlah Rp.37.828,20 Juta dan meningkat menjadi Rp.87.942,93 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,48%. Sedangkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan jauh lebih rendah, yaitu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,75%, dimana pada tahun 2013 jumlah Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.341.027,62 Juta dan meningkat menjadi Rp.459.607,84 Juta pada tahun 2017. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata pertahun anggaran PAD yang jauh lebih besar tersebut belum mampu mengurangi secara berarti ketergantungan Kota Padang Panjang dari Pemerintah Pusat.

Pertumbuhan rata-rata pertahun penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD lainnya. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah adalah Rp.24.513,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.68.298,87 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 29,20%. Sedangkan sumber target PAD yang terendah berasal dari Retribusi Daerah. Jika pada tahun 2013 jumlah Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp.5.114,96 Juta dan turun menjadi Rp.5.085,97 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,14%. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah dan lebih tingginya Lain-Lain PAD yang Sah disebabkan adanya perubahan status Rumah Sakit Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebelum menjadi BLUD diakui sebagai Retribusi Daerah namun setelah menjadi BLUD diperlakukan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Sumber penerimaan PAD lainnya, yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan target Pajak Daerah adalah 13,90% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan adalah 16,89%. Anggaran Pajak Daerah meningkat dari Rp.4.078,50 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.6.864,65 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp.4.121,24 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.7.693,43 Juta pada tahun 2017.

Dari 3 sumber Dana Perimbangan, sumber anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Anggaran pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.22.732,66 Juta dan meningkat menjadi Rp.71.620,60 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 33,23%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.15.448,41 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.2.550,88 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.1 berikut menjelaskan perkembangan anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.1
Perkembangan Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	418.067,24	478.219,62	497.538,43	560.907,76	609.996,06	9,91
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.828,20	46.724,33	53.068,56	67.242,23	87.942,93	23,48
a	Pendapatan Pajak Daerah	4.078,50	5.051,00	5.086,74	6.323,34	6.864,65	13,90
b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.114,96	4.307,56	4.358,85	5.574,92	5.085,97	(0,14)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.121,24	4.495,82	5.780,33	7.035,00	7.693,43	16,89
d	Lain-lain PAD Yang Sah	24.513,50	32.869,95	37.842,64	48.308,98	68.298,87	29,20
2	PENDAPATAN TRANSFER	379.146,40	430.336,23	444.469,87	493.565,53	521.653,13	8,30
	DANA PERIMBANGAN	341.027,62	386.554,10	391.404,25	476.895,76	459.607,84	7,75
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.448,41	12.971,22	14.473,03	11.880,81	12.550,88	(5,06)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	302.846,55	341.743,15	343.008,70	382.149,49	375.436,36	5,52
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	22.732,66	31.839,72	33.922,52	82.865,45	71.620,60	33,23
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	28.620,18	30.186,59	37.681,33	-	42.836,37	10,61
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.498,60	13.595,55	15.384,29	16.669,77	19.208,93	19,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092,63	1.159,05	-	100,00	400,00	(22,21)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

b. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah selama periode 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang dianggarkan. Jika untuk periode tersebut telah

dianggarkan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,90%, tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar 9,11%. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.417.015,12 Juta dan meningkat menjadi Rp.591.062,89 Juta pada tahun 2017. Sekalipun terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi namun peningkatan yang terjadi pada 2 tahun terakhir relatif sama.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.41.513,49 Juta dan meningkat menjadi Rp.88.837,03 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 20,95%. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan meningkat dari Rp.336.164,74 Juta pada tahun 2013 dan menjadi Rp.439.519,04 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,93%.

Dari 4 sumber Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan pertumbuhan penerimaannya pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD lainnya. Pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2013 berjumlah Rp.27.837,14 Juta dan meningkat menjadi Rp.70.102,81 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 25,97%. Sedangkan pertumbuhan sumber penerimaan PAD terendah berasal dari Retribusi Daerah, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 6,27%, mengalami penurunan dari Rp.5.355,48 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.4.134,30 Juta pada tahun 2017.

Sejalan dengan anggaran pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sumber realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.17.049,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.53.108,35 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 32,85%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.16.268,69 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.10.974,34 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.2 berikut menunjukkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	417.015,12	475.208,49	505.170,04	549.936,36	591.062,89	9,11
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.513,49	51.529,09	67.035,65	70.357,12	88.837,03	20,95
a	Pendapatan Pajak Daerah	4.060,96	5.388,06	5.556,83	6.134,35	6.906,48	14,20
b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.355,48	4.602,13	4.488,80	5.095,65	4.134,30	(6,27)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.259,91	4.453,82	5.760,14	5.067,98	7.693,43	15,93
d	Lain-lain PAD Yang Sah	27.837,14	37.085,08	51.229,89	54.059,14	70.102,81	25,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	374.409,00	422.520,35	435.531,88	479.479,24	501.825,86	7,60
	DANA PERIMBANGAN	336.164,74	378.738,22	381.194,55	461.720,10	439.519,04	6,93
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.268,69	13.115,27	11.047,83	10.940,82	10.974,34	(9,37)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	302.846,55	341.743,15	343.008,70	382.149,49	375.436,36	5,52
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.049,50	23.879,79	27.138,02	68.629,78	53.108,35	32,85
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	28.620,18	30.186,59	37.681,33	-	42.836,37	10,61
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.624,08	13.595,55	16.656,00	17.759,14	19.470,45	19,26
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092,63	1.159,05	2.602,50	100,00	400,00	(22,21)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

c. Perbandingan Realisasi dan Anggaran

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2013 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Jika pada tahun 2013 dapat direalisasikan anggaran pendapatan sebesar 99,75%, tetapi pada tahun 2017 hanya dapat terealisasi sebesar 96,20%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Padang Panjang relatif baik karena mampu merealisasikan anggarannya di atas 90,00%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah relatif lebih baik dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai sebesar 110,40% dan realisasi Dana Perimbangan rata-rata sebesar 97,28%. Baik pada tahun 2013 maupun tahun 2017, sumber pendapatan daerah yang menunjukkan kinerja kurang baik hanya Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata realisasinya hanya sebesar 77,39%. Sedangkan untuk jenis pendapatan lainnya menunjukkan realisasi anggaran lebih di atas 90,00%.

Relatif masih rendahnya kinerja sumber pendapatan daerah ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Padang Panjang kedepannya. Realisasi anggaran penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 81,29%. Retribusi Daerah terkait dengan pelayanan, sehingga rendahnya capaian realisasi anggaran ini secara tidak langsung menggambarkan belum optimalnya pelayanan. Penurunan sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh pengalihan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Daerah, meskipun penurunan Bagi Hasil Pajak

dengan peningkatan Pajak Daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan pemungutan PBB, juga tidak sebanding. Disamping itu dimungkinkan karena adanya penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Persentase realisasi anggaran pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang 2013-2017

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	99,75	99,37	101,53	98,04	96,90	99,12	(0,72)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109,74	110,28	126,32	104,63	101,02	110,40	(2,05)
a	Pendapatan Pajak Daerah	99,57	106,67	109,24	97,01	100,61	102,62	0,26
b	Pendapatan Retribusi Daerah	104,70	106,84	102,98	91,40	81,29	97,44	(6,13)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103,36	99,07	99,65	72,04	100,00	94,82	(0,82)
d	Lain-lain PAD Yang Sah	113,56	112,82	135,38	111,90	102,64	115,26	(2,50)
2	PENDAPATAN TRANSFER	98,75	98,18	97,99	97,15	96,20	97,65	(0,65)
	DANA PERIMBANGAN	98,57	97,98	97,39	96,82	95,63	97,28	(0,76)
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105,31	101,11	76,33	92,09	87,44	92,46	(4,54)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	75,00	75,00	80,00	82,82	74,15	77,39	(0,28)
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	100,00	100,00	100,00			100,00	(100,00)
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,32	100,00	108,27	106,53	101,36	103,50	0,01
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

d. Proporsi Elemen Pendapatan

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan, maka Kota Padang Panjang telah menunjukkan kinerja yang baik. Bila diperhatikan secara lebih cermat ternyata dari tahun ke tahun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2013, kontribusi PAD hanya sebesar 9,95%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 15,03%. Peningkatan ini terutama berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah, yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu dari 6,68% pada tahun 2013 menjadi 11,86% pada tahun 2017.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi pertumbuhan negatif atas Retribusi Daerah. Akibatnya, proporsi Retribusi Daerah mengalami penurunan dari 1,28% pada tahun 2013 menjadi 0,70% pada tahun 2017.

Hal yang sama juga terjadi untuk sumber pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam. Kedua-dua sumber dana transfer dari pusat yang dihasilkan dari kinerja atau potensi daerah juga menunjukkan proporsi yang mengalami penurunan. Jika pada tahun 2013, kontribusi Bagi Hasil Pajak adalah 3,68%, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,67%. Demikian juga dengan kontribusi Bagi Hasil Sumberdaya Alam yang mengalami penurunan dari 0,22% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada tahun 2017. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan penurunan perekonomian Kota Padang Padang sehingga pajak yang bisa dipungut pemerintah pusat mengalami penurunan.

Tabel 3.4. berikut menunjukkan perkembangan proporsi sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.4
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (persen)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLIDAERAH	9,05	9,77	10,67	11,99	14,42	12,35
a	Pendapatan Pajak Daerah	0,98	1,06	1,02	1,13	1,13	3,64
b	Pendapatan Retribusi Daerah	1,22	0,90	0,88	0,99	0,83	(9,14)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,99	0,94	1,16	1,25	1,26	6,35
d	Lain-lain PAD Yang Sah	5,86	6,87	7,61	8,61	11,20	17,55
2	PENDAPATAN TRANSFER	90,69	89,99	89,33	87,99	85,52	(1,46)
	DANA PERIMBANGAN	81,57	80,83	78,67	85,02	75,35	(1,97)
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,70	2,71	2,91	2,12	2,06	(13,62)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	72,44	71,46	68,94	68,13	61,55	(3,99)
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5,44	6,66	6,82	14,77	11,74	21,22
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi	6,85	6,31	7,57	-	7,02	0,64
e	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,27	2,84	3,09	2,97	3,15	8,50
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,26	0,24	-	0,02	0,07	(29,23)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah yang

efisien, efektif, transparan, akuntabel serta meningkatkan penetapan prioritas alokasi anggaran.

1) Anggaran Belanja

Perkembangan kinerja anggaran belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 cenderung baik karena pertumbuhan belanja langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tidak langsung. Tahun 2013 anggaran belanja berjumlah Rp.475.637,93 Juta, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.755.647,40 Juta, artinya mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,27%. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan minus sebesar 1,43%, yaitu dari Rp.230.423,79 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.217.539,29 Juta. Sedangkan Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp.245.214,14 Juta tahun 2013 menjadi Rp.538.108,11 Juta ditahun 2017. Artinya dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 21,71% per tahun.

Kinerja anggaran belanja yang lebih baik juga ditunjukkan dari perkembangan jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dibandingkan dengan belanja lainnya. Pertumbuhan rata-rata pertahun Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung lebih rendah dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang lebih mengutamakan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih banyak menggunakan belanja barang dan jasa serta belanja modal dibandingkan belanja pegawai.

Anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,35%, yaitu dari Rp.199.448,81 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.210.427,10 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran belanja pegawai pada belanja langsung mengalami pertumbuhan minus sebesar 20,25%, yaitu dari Rp.43.762,79 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.17.705,96 Juta pada tahun 2017. Penurunan jumlah belanja pegawai pada belanja langsung ini tidak hanya direncanakan pada tahun-tahun terakhir saja, tetapi secara bertahap dari tahun 2013 jumlah belanja pegawai pada belanja langsung ini selalu menunjukkan penurunan.

Anggaran belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,49% selama 5 tahun, yaitu dari Rp.107.796,13 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.219.786,65 Juta ditahun 2017. Sedangkan anggaran belanja modal mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 33,85%, yaitu dari Rp.93.655,22 Juta pada tahun 2013 menjadi

Rp.300.615,50 Juta pada tahun 2017. Relatif tingginya pertumbuhan anggaran belanja modal merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 3.5 berikut menjelaskan perkembangan anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.5
Perkembangan Anggaran Belanja Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	475.637,93	544.621,70	630.804,76	705.483,83	755.647,40	12,27
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	230.423,79	238.512,76	250.946,18	254.110,69	217.539,29	(1,43)
a	Belanja Pegawai	199.448,81	227.877,02	247.919,53	249.805,94	210.427,10	1,35
b	Belanja Hibah	13.163,00	7.733,00	757,30	1.111,50	5.291,04	(20,38)
c	Belanja Bantuan Sosial	4.149,40	1.398,03	125,50	50,50	261,15	(49,91)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	500,00	500,00	760,00	560,00	560,00	2,87
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik						
f	Belanja Tidak Terduga	13.162,58	1.004,71	1.383,85	2.582,75	1.000,00	(47,50)
2	BELANJA LANGSUNG	245.214,14	306.108,94	379.858,08	451.373,14	538.108,11	21,71
a	Belanja Pegawai	43.762,79	19.673,67	41.841,19	14.855,21	17.705,96	(20,25)
b	Belanja Barang dan Jasa	107.796,13	150.161,93	165.040,69	182.363,24	219.786,65	19,49
c	Belanja Modal	93.655,22	136.273,35	172.976,20	254.154,69	300.615,50	33,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

2) Realisasi Belanja

Realiasi Total Belanja mengalami peningkatan dari Rp.393.183,73 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.608.108,21 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,52%. Realiasi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari Rp.196.971,43 Juta ditahun 2013 menjadi Rp.197.210,15 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,03%. Sedangkan realiasi Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp.196.212,30 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.410.898,06 Juta di tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 20,30%. Lebih besarnya pertumbuhan realisasi Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung ini menunjukkan bahwa kinerja realiasi belanja Kota Padang Panjang relatif Baik.

Kinerja belanja yang lebih baik juga ditunjukkan oleh pertumbuhan rata-rata per tahun untuk setiap elemen belanja langsung. Pertumbuhan rata-rata per tahun dari realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja pegawai pada belanja langsung lebih rendah

dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta dengan belanja modal.

Realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari Rp.186.229,47 Juta pada tahun 2013, menjadi Rp.192.156,86 Juta di tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,79%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada belanja langsung mengalami penurunan dari Rp.37.906,69 Juta pada tahun 2013, menjadi Rp.14.820,27 Juta di tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun minus 20,93%. Penurunan belanja pegawai pada belanja langsung ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja.

Sebaliknya, realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari Rp.90.089,89 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.184.568,54 Juta pada tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,64%. Sedangkan realisasi belanja modal mengalami peningkatan dari Rp.68.215,72 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.211.509,25 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 32,70% per tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi belanja aparatur dan lebih meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan atau untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.6 berikut menyajikan perkembangan realisasi belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017.

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Belanja Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	393.183,73	406.617,04	491.459,79	548.861,09	608.108,21	11,52
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	196.971,43	209.288,91	215.295,75	234.745,28	197.210,15	0,03
a	Belanja Pegawai	186.229,47	203.655,17	214.697,80	233.177,66	192.156,86	0,79
b	Belanja Hibah	9.017,58	4.069,16	35,64	1.013,96	4.466,79	(16,11)
c	Belanja Bantuan Sosial	968,70	1.071,83	-	50,50	108,40	(42,16)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	449,64	492,75	562,31	503,16	478,11	1,55
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	
f	Belanja Tidak Terduga	306,04	-	-	-	-	
2	BELANJA LANGSUNG	196.212,30	197.328,13	276.164,04	314.115,81	410.898,06	20,30
a	Belanja Pegawai	37.906,69	16.050,28	31.365,60	12.795,77	14.820,27	(20,93)
b	Belanja Barang dan Jasa	90.089,89	116.565,18	133.608,03	154.420,12	184.568,54	19,64
c	Belanja Modal	68.215,72	64.712,67	111.190,41	146.899,92	211.509,25	32,70

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

3) Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja

Realisasi anggaran belanja Kota Padang Panjang pada tahun 2013 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2013 dapat direalisasikan anggaran belanja sebesar 82,66%, tetapi pada tahun 2017 hanya dapat direalisasikan sebesar 80,480%. Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja Kota Padang Panjang relatif kurang baik karena hanya mampu merealisasikan anggaran belanja di bawah 90,00%. Kecuali Belanja Pegawai-tidak langsung, semua jenis belanja menunjukkan realisasi anggaran di bawah 90,00%.

Namun, jika dibandingkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasi anggaran belanja tidak langsung menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan belanja langsung. Realisasi anggaran rata-rata belanja tidak langsung selama 5 tahun adalah sebesar 88,41% dan belanja langsung menunjukkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 72,63%.

Adapun persentase realisasi anggaran belanja daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja
Kota Padang Panjang 2013-2017

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	82,66	74,66	77,91	77,80	80,48	78,70	(0,67)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	85,48	87,75	85,79	92,38	90,65	88,41	1,48
a	Belanja Pegawai	93,37	89,37	86,60	93,34	91,32	90,80	(0,55)
b	Belanja Hibah	68,51	52,62	4,71	91,22	84,42	60,30	5,36
c	Belanja Bantuan Sosial	23,35	76,67	-	100,00	41,51	48,30	15,47
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	89,93	98,55	73,99	89,85	85,38	87,54	(1,29)
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik							
f	Belanja Tidak Terduga	2,33					2,33	-
2	BELANJA LANGSUNG	80,02	64,46	72,70	69,59	76,36	72,63	(1,16)
a	Belanja Pegawai	86,62	81,58	74,96	86,14	83,70	82,60	(0,85)
b	Belanja Barang dan Jasa	83,57	77,63	80,95	84,68	83,98	82,16	0,12
c	Belanja Modal	72,84	47,49	64,28	57,80	70,36	62,55	(0,86)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

4) Proporsi Elemen Belanja

Proporsi belanja tidak langsung sedikit lebih besar dibandingkan belanja langsung dengan perbandingan 50,10% dengan 40,90% pada tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2017 perbandingan ini berubah secara signifikan menjadi 32,43% untuk belanja tidak langsung dan

67,57% untuk belanja langsung. Proporsi belanja pegawai tidak pada belanja langsung yang mengalami penurunan dari 47,36% pada tahun 2103 menjadi 31,60% pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsi belanja pegawai pada belanja langsung, yang mengalami penurunan dari 9,64% pada tahun 2013 menjadi 2,44% pada tahun 2017.

Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari 22,91% pada tahun 2013 menjadi 30,35% pada tahun 2017. Sedangkan proporsi belanja modal meningkat dari 17,35% pada tahun 2013 menjadi 34,78% pada tahun 2017. Untuk jenis belanja lainnya menunjukkan proporsi belanja yang mengalami penurunan. Artinya proporsi belanja lainnya tersebut pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 atau terjadi penurunan proporsi belanja.

Tabel 3.8 berikut memperlihatkan persentase proporsi belanja daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata belanja daerah per tahun.

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2013 – 2017 (persen)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA						
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,10	51,47	43,81	42,77	32,43	(10,30)
a	Belanja Pegawai	47,36	50,09	43,69	42,48	31,60	(9,62)
b	Belanja Hibah	2,29	1,00	0,01	0,18	0,73	(24,77)
c	Belanja Bantuan Sosial	0,25	0,26	-	0,01	0,02	(48,14)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	0,11	0,12	0,11	0,09	0,08	(8,94)
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	
f	Belanja Tidak Terduga	0,08	-	-	-	-	
2	BELANJA LANGSUNG	49,90	48,53	56,19	57,23	67,57	7,87
a	Belanja Pegawai	9,64	3,95	6,38	2,33	2,44	(29,09)
b	Belanja Barang dan Jasa	22,91	28,67	27,19	28,13	30,35	7,28
c	Belanja Modal	17,35	15,91	22,62	26,76	34,78	18,99

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk pelunasan hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Kebijakan untuk menutup defisit yang terjadi di Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 hanya ditutupi dengan memanfaatkan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (penerimaan pembiayaan). Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terjadi hanya untuk menambah penyertaan modal. Realisasi pembiayaan APBD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2013 – 2017 (Rp.juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
C	PEMBIAYAAN	57.570,69	81.402,08	-	144.576,07	145.651,34	26,12
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	67.577,69	81.402,08	-	147.976,07	145.651,34	21,17
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	67.577,69	81.402,08	-	147.976,07	145.651,34	21,17
2	PENGELURAN PEMBIAYAAN						
1	Penyertaan Modal/Investasi	10.007,00	-	15.800,00	3.400,00	-	(100,00)
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	10.007,00	-	15.800,00	3.400,00	-	(100,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013 dan 2017

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Neraca daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 78,54%, 11,70%, dan 5,13%, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2013 dengan tahun 2017.

Berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 nilai aset hanya sebesar Rp.842.727,46 Juta dan kemudian meningkat menjadi Rp.1.232.511,11 Juta pada tahun 2017, yang berarti dalam kurun selama tahun 2013-2017 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,97%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari 3 sumber peningkatan aset Kota Padang Panjang tersebut, peningkatan jumlah

aset tetap jauh lebih tinggi dibandingkan 2 kelompok aset lainnya. Namun dari segi pertumbuhan rata-rata per tahun, peningkatan nilai Aktiva Lancar lebih tinggi dibandingkan peningkatan aset tetap dan aset lancar. Nilai aset tetap meningkat dari Rp.654.352,95 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.979.243,41 Juta pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,60%. Sedangkan pertumbuhan aset lancar relatif lebih besar yaitu sebesar 15,71%, dan pertumbuhan Investasi jangka panjang sebesar 4,18%.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga akan sama dengan jumlah pertumbuhan kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan ekuitas per tahun adalah 9,07%, pertumbuhan kewajiban sebesar 115,11%. Namun karena komposisi ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas.

Tabel 3.10 berikut menyajikan perkembangan jumlah elemen/pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.10
Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	28,256.69	92,559.88	66,574.62	73,359.61	116,522.50	42.50
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.54	7.54	104.60	79.52	136.26	62.51
Kas di Bendahara Penerima	12.04	27.76	905.95	2,026.01	17.78	10.24
Kas di Bendahara BLUD	3,784.87	8,148.41	10,943.79	5,253.55	4,375.46	3.69
Kas Lainnya			857.83	977.46	874.16	
Setara Kas	49,350.00	49,968.68	70,350.00	67,000.00	9,000.00	(34.65)
Piutang Pajak Daerah	221.20	513.75	3,362.21	3,279.93	3,547.37	100.12
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih				(2,481.18)	(2,691.42)	
Piutang Pajak Daerah Neto				798.75	131,782.10	
Pajak Retribusi Daerah	444.83	519.75	693.08	803.04	1,542.10	36.45
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih				(696.94)	(1,408.61)	
Piutang Retribusi Daerah Neto				106.09	263,697.70	
Piutang Dana Bagi Hasil	153.96	659.21	1,029.94	5,060.36	1,136.11	64.82
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				183.55	183.55	
Piutang lain-lain PAD yang Sah				7,393.75	9,735.47	
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih				(2,147.44)	(799.86)	
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto				5,246.32	8,935.62	
Piutang Lain-Lain	1,416.31	9,543.97	3,076.51	-		
Penyisihan Piutang			(2,855.68)	-		
Persediaan	4,606.88	4,935.02	6,348.57	6,737.26	6,868.89	10.50
Beban Dibayar Dimuka	255.94	255.94	513.57	212.09	9,638.26	147.72
Jumlah Aset Lancar	8,522.25	167,139.90	161,904.99	167,040.56	158,678.02	15.71

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya (dana Bergulir)	5,102.83	3,821.74	4,541.86	3,449.21	3,263.66	(10.57)
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-	-	(1,943.34)	(1,752.06)	(2,393.47)	
Jumlah Investasi Non Permanen	5,102.83	3,821.74	2,598.52	1,697.15	870.19	(35.74)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42,811.91	42,163.84	56,988.67	59,748.03	55,570.62	6.74
Jumlah Investasi Permanen	42,811.91	42,163.84	56,988.67	59,748.03	55,570.62	6.74
Jumlah Investasi Jangka Panjang	7,914.74	45,985.58	59,587.19	61,445.17	56,440.81	4.18
ASET TETAP	-	-	-	-	-	
Tanah	162,644.90	169,140.30	191,718.43	238,021.16	264,113.22	12.89
Peralatan dan Mesin	166,525.35	180,805.17	206,256.09	225,126.00	250,813.86	10.78
Gedung dan Bangunan	291,926.43	314,507.04	332,445.79	326,172.66	345,176.17	4.28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	256,183.20	279,939.13	309,945.85	343,268.22	406,796.67	12.26
Aset Tetap Lainnya	7,578.74	9,380.64	11,700.00	11,338.67	10,670.37	8.93
Konstruksi dalam Pengerjaan	8,427.71	2,639.86	16,771.37	66,120.37	216,185.79	125.05
Akumulasi Penyusutan	(238,933.40)	(301,104.82)	(397,488.08)	(489,279.03)	(514,512.67)	21.14
Jumlah Aset Tetap	654,352.95	655,307.32	671,349.46	720,768.05	979,243.41	10.60
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
ASET LAINNYA						
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi				44.78	44.78	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24,430.56	24,430.56	24,430.56	24,430.56	24,430.56	
Aset Tak Berwujud			303.18	666.08	1,997.90	
Aset Lain-lain	27,506.97	21,199.53	14,193.33	85,191.72	28,781.17	1.14

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			(8,226.36)	(24,212.19)	(17,105.53)	
Jumlah Aset Lainnya	1,937.52	45,630.09	30,700.71	86,120.96	38,148.87	(7.42)
TOTAL ASET	842,727.46	914,062.89	923,542.36	1,035,374.75	1,232,511.11	9.97
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	9.02	0.15	-	48.90	119.12	90.62
Utang Jangka Pendek			5,028.94	3,387.66		
Utang Belanja			5,686.23	2,394.50	34,618.21	
Pendapatan Diterima Dimuka			3.00	95.21	78.51	
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,995.44	5,098.06			8,104.73	41.96
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	2,004.46	5,098.21	5,739.52	5,926.26	42,920.56	115.11
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	2,004.46	5,098.21	5,739.52	5,926.26	42,920.56	115.11
EKUITAS			917,802.84	1,029,448.48		
JUMLAH EKUITAS	840,723.00	908,964.67	917,802.84	1,029,448.48	1,189,590.55	9.07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	842,727.46	914,062.89	923,542.36	1,035,374.75	1,232,511.11	9.97

Sumber: LKPD (Neraca) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan hasil Analisa keuangan daerah Kota Padang Panjang, maka dapat dijelaskan bahwa baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Kota Padang Panjang, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada tahun 2013 dengan tahun 2017. Pada tahun 2013, perlakuan akuntansi masih menggunakan basis kas akrual dan tidak ada pengakuan hutang belanja. Tetapi, dengan pemberlakuan basis akrual dari tahun 2015, maka pada setiap akhir tahun harus diakui hutang-hutang belanja yang akan dilunasi pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2017 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2013.

Rasio lancar mengalami penurunan dari 4.416,26% pada tahun 2013 menjadi 369,70 % pada tahun 2017. Sedangkan rasio quick turun dari 4.186,43% pada tahun 2013 menjadi 353,70% pada tahun 2017. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas; turun dari 4.062,10% pada tahun 2013 menjadi 305,04% pada tahun 2017. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut.

Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar di bawah 1% saja pada tahun 2013 dan menjadi mendekati 4%. Artinya, hutang yang dimiliki Kota Padang Panjang hanya kurang dari 4% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 4 (empat) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Padang Panjang yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel berikut menyajikan rasio keuangan Kota Padang Panjang.

Tabel 3.11
Rasio Keuangan Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun (%)					Rata-Rata Pertum- buhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rasio lancar (current ratio)	4,416.26	3,278.40	2,820.88	2,818.65	369.70	(46.21)

No	Uraian	Tahun (%)					Rata-Rata Pertum- bunan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	Rasio quick (quick ratio)	4,186.43	3,181.60	2,710.27	2,704.96	353.70	(46.09)
3	Kas Rasio	4,062.10	2,956.18	2,608.87	2,509.10	305.04	(47.65)
4	Rasio total hutang terhadap total aset	0.24	0.56	0.62	0.57	3.48	95.61
5	Rasio hutang terhadap modal	0.24	0.56	0.63	0.58	3.61	97.23

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 - 2017

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah Kota Padang Panjang dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.12
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rata2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	48,45%	43,79%	39,78%	36,02%	28,79%	39,37%
Belanja Pegawai	41,93%	41,84%	39,30%	35,41%	27,85%	37,27%
Belanja Hibah	2,77%	1,42%	0,12%	0,16%	0,70%	1,03%
Belanja Bantuan Sosial	0,87%	0,26%	0,02%	0,01%	0,03%	0,24%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,11%	0,09%	0,12%	0,08%	0,07%	0,09%
Belanja Tidak Terduga	2,77%	0,18%	0,22%	0,37%	0,13%	0,73%
BELANJA LANGSUNG	51,55%	56,21%	60,22%	63,98%	71,21%	60,63%
Belanja Pegawai	9,20%	3,61%	6,63%	2,11%	2,34%	4,78%
Belanja Barang dan Jasa	22,66%	27,57%	26,16%	25,85%	29,09%	26,27%
BELANJA MODAL	19,69%	25,02%	27,42%	36,03%	39,78%	29,59%

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Padang Panjang 2013-2017 menunjukkan bahwa dari

tahun ke tahun proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Hingga tahun 2017 proporsi belanja tidak langsung menurun mencapai 28,79% dan belanja langsung terus meningkat hingga mencapai 71,21%. Sedangkan jika dilihat dari rata-ratanya, proporsi penggunaan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 39,37 % sedangkan belanja langsung mencapai 60,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2013-2017 secara umum belanja langsung berhubungan dengan program-program pembangunan, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik telah berada dalam kondisi yang optimal yang ditunjukkan dengan proporsi Belanja Langsung yang selalu diatas Proporsi Belanja Tidak Langsung. Sementara itu, pada komponen belanja tidak langsung proporsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja modal.

A. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Padang Panjang. Kebutuhan belanja aparatur meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif dimana proporsi tertinggi di tahun 2013 sebesar 50,08%, tahun 2014 turun menjadi 44,24 dan kembali naik di tahun 2015 sebesar 44,74%. Angka ini semakin menurun di setiap tahunnya hingga mencapai 30,19% pada Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.13
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan Daerah)	%
2013	243.211.601.231,00	485.644.931.961,17	50,08%
2014	247.550.682.571,00	559.621.698.906,64	44,24%
2015	289.760.719.095,00	647.604.257.350,47	44,74%
2016	264.661.157.489,00	708.883.834.833,89	37,33%
2017	228.133.060.459,39	755.647.398.631,39	30,19%

Sumber : LKPD (Neraca) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

B. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, perlu diketahui juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel berikut adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017:

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

Urusan	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung	189.739.499.597,68	204.147.920.436,00	215.191.459.404,00	233.680.827.498,00	192.634.964.792,00
Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	186.229.468.354,00	203.655.166.724,00	214.697.804.190,00	233.177.663.249,00	192.156.856.414,00
Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	492.753.712,00	493.655.214,00	503.164.249,00	478.108.378,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	3.060.390.100,00	-	-	-	-
Belanja Langsung	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80
Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80
Total	207.797.242.611,98	256.576.668.046,00	280.187.216.214,00	307.226.763.587,26	263.879.061.323,80

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Anggaran					Rata2 Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	186.679.109.497,68	204.147.920.436,00	215.191.459.404,00	233.680.827.498,00	192.634.964.792,00	1,45%
	Belanja Gaji, Tunjangan dan termasuk (Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH)	186.229.468.354,00	203.655.166.724,00	214.697.804.190,00	233.177.663.249,00	192.156.856.414,00	1,45%
	Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	492.753.712,00	493.655.214,00	503.164.249,00	478.108.378,00	1,68%
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
B	BELANJA LANGSUNG	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80	56,08%
	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80	56,08%
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.007.000.000,00	-	15.800.000.000,00	3.400.000.000,00	-	-44,62%
	Penyertaan Modal	10.007.000.000,00	-	15.800.000.000,00	3.400.000.000,00	-	-44,62%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A+B+C)	214.743.852.511,98	256.576.668.046,00	295.987.216.214,00	310.626.763.587,26	263.879.061.323,80	6,18%

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Padang Panjang ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Kondisi keuangan daerah Kota Padang Panjang pada periode 2013 – 2017 mengalami dua kali surplus riil dan tiga kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2013, terdapat surplus anggaran sebesar 13.824 miliar rupiah, kemudian surplus meningkat menjadi 68.663 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi defisit anggaran yang sebesar 2.089 miliar rupiah. Kemudian naik sedikit menjadi 2.324 miliar rupiah tahun 2016 dan kembali naik menjadi 17.045 miliar rupiah tahun 2017.

Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017. Dan komposisi penutup defisit riil yang terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Tabel 3.16
Defisit Rill Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Realisasi Pendapatan Daerah	417.015.118.681,83	475.280.788.657,33	505.170.035.889,81	549.936.359.823,02	591.062.889.679,67
Dikurangi Realisasi Belanja :						
1	Realisasi Belanja Daerah	393.183.728.547,36	406.617.041.960,00	491.459.794.814,00	548.861.092.707,41	608.108.212.415,99
2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.007.000.000,00	-	15.800.000.000,00	3.400.000.000,00	-
B	Surplus/ Defisit riil	13.824.390.134,47	68.663.746.697,33	(2.089.758.924,19)	(2.324.732.884,39)	(17.045.322.736,32)

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Rill Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	67.577.692.601,17	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
C	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.577.692.601,17	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A-B) + C	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39	128.606.014.888,07

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 9,11%, dengan rincian pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,95%, Dana Perimbangan rata-rata sebesar 6,93% dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar -22,21%.

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata penerimaan pendapatan daerah 2013 sampai dengan 2017, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di Kota Padang Panjang maka penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,62% per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 10,26% per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 4,84% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah yang diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,21% per tahun.

Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing komponen untuk jenis komponen Pendapatan Asli Daerah, diprediksikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata masing-masingnya sebesar 10,26% per tahun. Untuk jenis komponen Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56% per tahun. Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata sebesar 5% per tahun dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan akan meningkat rata-rata sebesar 5,97% per tahun. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan dalam RPJMD ini bersifat dinamis, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam negeri neto.

Pos Dana Insentif Daerah tahun 2019 dianggarkan Rp.34.482.183.000,- karena predikat WTP yang diperoleh di tahun 2017 dan berbagai komponen perhitungan DID, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 diasumsikan DID tetap sama dengan tahun 2019. Selanjutnya untuk pendapatan Hibah dari pos Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diasumsikan sama.

B. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2013-2017, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Kota Padang Panjang :

- 1) Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 rata-rata akan meningkat sebesar 4,68% per tahun, dengan rincian pertumbuhan Belanja tidak langsung rata-rata sebesar 1,74% per tahun dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 6,60% per tahun.
- 2) Prosentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah rata-rata 60,92%, sehingga porsi belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 3) Dana BOS tercatat dalam kerangka belanja langsung, walaupun berupa anggaran *in & out*.
- 4) Belanja Langsung menjadi prioritas utama pembangunan yang meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan

Analisis proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat Kota Padang Panjang tahun 2019-2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

- 1) Pertumbuhan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai berikut:
 - Besaran belanja pegawai dirata-rata diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 1,77% per tahun
 - Belanja hibah diasumsikan sama per tahun
 - Belanja bantuan sosial diprediksi naik 10% per tahun

- Belanja bantuan keuangan sampai dengan tahun 2023 diperkirakan sama per tahunnya.
- 2) Belanja langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus dilaksanakan diperkirakan sebesar rata-rata 22,47% per tahun.
- 3) Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat dan prioritas utama diproyeksikan pertumbuhannya rata-rata 9,33% per tahun.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, yakni:

- 1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- 2) Asumsi indikator makro ekonomi
- 3) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi penerimaan pendapatan.

D. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada pembiayaan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, penerimaan pembiayaan pada penggunaan Silpa diperkirakan diasumsikan maksimal 6 % dari total belanja daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal untuk mendukung serta pembentukan perusahaan daerah yang nantinya akan bergerak dibebberapa bidang usaha.

Berikut digambarkan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Tabel 3.18
Proyeksi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023

Rek	Uraian	Rata2 Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	PENDAPATAN	5.62%	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.26%	84,612,013,881	94,981,535,405	104,726,640,936	115,471,594,295	127,318,979,873	140,381,907,208
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	10.26%	8,078,000,000	8,330,000,000	9,184,658,000	10,127,003,910	11,166,034,512	12,311,669,653
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.26%	5,103,577,000	5,336,577,000	5,884,109,800	6,487,819,465	7,153,469,743	7,887,415,739
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.26%	5,795,081,205	5,795,081,205	6,389,656,536	7,045,235,297	7,768,076,439	8,565,081,081
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.26%	65,635,355,676	75,519,877,200	83,268,216,600	91,811,535,623	101,231,399,179	111,617,740,735
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.84%	462,540,835,517	499,182,265,000	523,396,171,145	548,626,285,822	575,164,735,824	603,079,733,644
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6.56%	11,542,013,517	10,262,734,000	11,116,302,294	11,779,945,541	12,483,208,290	13,228,455,825
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.00%	375,436,356,000	388,615,652,000	408,046,434,600	428,448,756,330	449,871,194,147	472,364,753,854
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.97%	67,562,466,000	65,821,696,000	69,751,251,251	73,915,400,951	78,328,150,388	83,004,340,966
4.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00%	8,000,000,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.21%	26,644,915,330	25,704,011,517	27,974,060,050	27,974,060,050	27,974,060,050	27,974,060,050
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0.00%	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.46%	19,164,915,330	18,224,011,517	20,494,060,050	20,494,060,050	20,494,060,050	20,494,060,050
4.9	JUMLAH PENDAPATAN	5.62%	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
5.	BELANJA	4.68%	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.74%	285,470,750,453	281,992,967,924	277,977,469,698	286,308,742,340	294,816,835,139	302,006,772,431
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.77%	263,493,335,847	271,169,147,924	269,030,457,698	276,781,219,140	283,700,749,619	290,793,268,359
5.1.4.	Belanja Hibah	0.15%	19,764,549,300	8,531,900,000	6,581,900,000	7,081,900,000	8,581,900,000	8,581,900,000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.00%	659,754,000	731,920,000	805,112,000	885,623,200	974,185,520	1,071,604,072

Rek	Uraian	Rata2 Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0.00%	553,111,306	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.00%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.60%	416,933,029,163	400,374,843,998	417,019,402,433	448,463,197,827	482,240,940,608	518,628,928,471
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.50%	4,684,920,750	6,879,351,500	7,051,335,288	7,227,618,670	7,408,309,136	7,593,516,865
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.38%	264,727,707,959	271,616,286,874	270,968,692,720	294,281,191,124	319,421,076,322	346,908,271,426
5.2.3.	Belanja Modal	7.45%	147,520,400,453	121,879,205,624	138,999,374,426	146,954,388,033	155,411,555,149	164,127,140,180
5.8	JUMLAH BELANJA	4.68%	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
5.9	SURPLUS/(DEFISIT)	-4.50%	(128,606,014,888)	(62,500,000,000)	(38,900,000,000)	(42,700,000,000)	(46,600,000,000)	(49,200,000,000)
6.	PEMBIAYAAN	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	38,900,000,000	42,700,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.1.1.	Penggunaan SILPA	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.29	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0	0	3,000,000,000	1,500,000,000	0	0
6.299	PEMBIAYAAN NETO	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	38,900,000,000	42,700,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0	0	0	0

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang sebagaimana tabel 3.19.

Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang fluktuatif, dan angka tahun 2019 sampai dengan 2023 yang semakin meningkat menandakan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Realisasi 2017	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan pendapatan	591,062,889,680	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)	145,651,337,624	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
Pengeluaran Pembiayaan				3,000,000,000	1,500,000,000		
Total Penerimaan	736,714,227,304	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
Dikurangi							
Belanja Tidak Langsung	197,210,153,892	285,470,750,453	281,992,967,924	277,977,469,698	286,308,742,340	294,816,835,139	302,006,772,431
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	3,000,000,000	1,500,000,000	-	-
Kapasitas riil kemampuan keuangan	539,504,073,412	416,933,029,163	400,374,843,998	414,019,402,433	446,963,197,827	482,240,940,608	518,628,928,471

Dari total alokasi pagu indikatif yang tersedia, selanjutnya dialokasikan ke berbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program dan kegiatan dikelompokkan atas 3 prioritas, yakni prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Prioritas I merupakan program/kegiatan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan melalui beberapa program unggulan, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10%. Program prioritas I merupakan program dan kegiatan yang memberikan dampak luas pada masyarakat serta memberikan daya ungkit yang tinggi untuk capaian visi/misi daerah, serta juga diperuntukkan untuk prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan yang berdampak luas pada masing-masing segementasi public yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian		2019		2020		2021		2022		2023
Belanja Prioritas I	34.36	234,466,047,675	43.15	299,872,850,544	44.26	325,235,245,519	44.04	342,199,829,409	45.70	375,070,071,801
Belanja Daerah untuk Membiayai program pembangunan		234,466,047,675		299,872,850,544		325,235,245,519		342,199,829,409		375,070,071,801
Belanja Prioritas II	24.31	165,908,796,323	16.86	117,146,551,889	16.77	123,227,952,308	18.02	140,041,111,199	17.49	143,558,856,671
Belanja Langsung OPD		165,908,796,323		117,146,551,889		123,227,952,308		140,041,111,199		143,558,856,671
Belanja Prioritas III	41.33	281,992,967,924	40.00	277,977,469,698	38.97	286,308,742,340	37.94	294,816,835,139	36.80	302,006,772,431
Belanja Pegawai		271,169,147,924		269,030,457,698		276,781,219,140		283,700,749,619		290,793,268,359
Belanja Hibah		8,531,900,000		6,581,900,000		7,081,900,000		8,581,900,000		8,581,900,000
Belanja Bantuan Sosial		731,920,000		805,112,000		885,623,200		974,185,520		1,071,604,072
Belanja Bantuan Keuangan		560,000,000		560,000,000		560,000,000		560,000,000		560,000,000
Belanja Tidak Terduga		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Belanja Daerah	100.00	682,367,811,922	100.00	694,996,872,131	100.00	734,771,940,167	100.00	777,057,775,747	100.00	820,635,700,902